

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGADILAN TUN YOGYAKARTA
TRIWULAN I TAHUN 2025
(Periode Januari – Maret 2025)



 Jl. Janti No. 66, Banguntapan,
 ptun-yogyakarta.go.id
 infoterpadu.ptunyogyakarta@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Triwulan I Tahun 2025 telah selesai sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan survei dalam rangka Peningkatan Efektifitas Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM.

Pelaksanaan survei dilakukan selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Januari s.d. Maret 2025 dan merujuk pada:

**Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.**

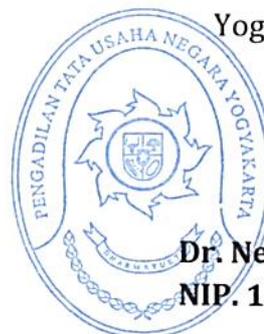
Tujuan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah untuk memberikan gambaran perilaku anti korupsi secara umum pada setiap instansi pemerintah khususnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta serta Unit Kerja ZI melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terdiri dari 5 (lima) area yaitu:

1. Ada/tidaknya diskriminasi pelayanan.
2. Ada/tidaknya pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan.
3. Ada/tidaknya penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku.
4. Ada/tidaknya pungutan liar/pungli.
5. Ada/tidaknya percaloan/perantara tidak resmi.

Demikian disampaikan, mohon menjadi periksa.

Yogyakarta, 8 April 2025



Ketua

**Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H.
NIP. 197612042001122002**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I KUESIONER SURVEI	6
BAB II METODELOGI SURVEI.....	9
A. KRITERIA RESPONDEN	9
B. METODE PENCAHAHAN	9
C. METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS	10
1. Pengolahan Data	10
2. Skala Pengukuran	10
3. Metode Pengolahan Data Survei.....	11
BAB III PENGOLAHAN SURVEI.....	15
A. Analisa Hasil Survei	15
1. Tahapan Pelaksanaan Survei	15
2. Survei Persepsi Anti Korupsi.....	19
B. Tindak Lanjut Hasil Survei	26
BAB IV DATA SURVEI	27
A. Data Responden	27
B. Data Dukung Lainnya	29

DAFTAR TABEL

TABLE 1 PERSEPSI, INTERVAL SPAK, INTERVAL KONVERSI SPAK, MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN	12
TABLE 2 NILAI TINGKAT KEPUASAN.....	14
TABLE 3 UJI VALIDITAS DAN REABILITAS HASIL SURVEI	16
TABLE 4 DISTRIBUSI NILAI R TABEL SIGNIFIKANSI 5% DAN 1%.....	18
TABLE 5 UJI RELIABILITAS CRONBACH'S ALPHA.....	19
TABLE 6 PENGOLAH HASIL DATA SURVEI	20
TABLE 7 PERSEPSI RESPONDEN	22
TABLE 8 PERSEPSI RESPONDEN	22
TABLE 9 PERSEPSI RESPONDEN	23
TABLE 10 PERSEPSI RESPONDEN.....	24
TABLE 11 PERSEPSI RESPONDEN.....	25
TABLE 12 NILAI PERSEPSI SETIAP UNSUR PELAYANAN.....	26

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 USIA RESPONDEN	27
GAMBAR 2 JENIS KELAMIN RESPONDEN.....	28
GAMBAR 3 TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN.....	28
GAMBAR 4 RESPONDEN TERKAIT LAYANAN	29

BAB I KUESIONER SURVEI



Data Responden

* Nama Lengkap

* Jenis Kelamin

Pria
 Wanita

* Usia

* No Telepon/HP

Alamat email

* Alamat Domisili

* Pekerjaan

* Pendidikan

* SATKER YANG DISURVEI

Berikutnya

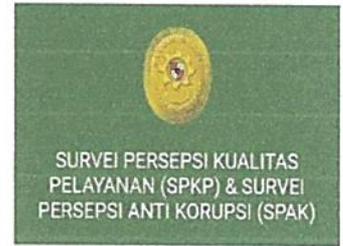


Survei Persepsi Anti Korupsi

- Jumlah skor kuisioner berkisar dengan nilai dari 1 sampai 5 sebagai berikut:
- 1 Tidak Pernah
 - 2 Tidak Pernah
 - 3 Sering Sekali
 - 4 Sering
 - 5 Sangat Sering

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.
Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena factor suku, agama, keberagaman, diameter dan sebagainya.
2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini.
Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan kecurangan seperti penyeboran amplop, memperpanjang waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.
Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang membolehkan/meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan, jadi, rokok, ponsel, pakaian, elektronik, pakaian bahan pagen dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi/hotel, esort, persharing/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll diluar ketentuan.
4. Tidak ada pungutan luar (pungli) pada unit layanan ini.
Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi & pungli tidak dikamiflaskan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terimakasih", dsb.
5. Tidak ada persyaratan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini.
Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini maupun pihak luar yang memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai.

Berikutnya



Terima kasih telah berpartisipasi untuk membangun Pengadilan yang lebih baik.

KUESIONER SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

Kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas dan integritas pemberian pelayanan pada unit layanan ini. Berilah nilai bintang antara 1-6 pada setiap pernyataan, dimana semakin banyak bintang menunjukkan bahwa Bapak/Ibu semakin setuju bahwa kualitas pelayanan pada unit layanan ini semakin baik.

Pertanyaan terkait Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya).

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dil.

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.

4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb).

5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/ atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai)

BAB II

METODELOGI SURVEI

A. KRITERIA RESPONDEN

Survei Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta awal tahun 2025 menargetkan pengguna layanan yang menerima layanan pada bulan Januari s.d. Maret 2025. Pengumpulan data dilakukan menggunakan google form dengan tautan [SURVEI PELAYANAN PUBLIK](#) yang tertaut pada website Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, bahwa penerima Layanan yang dapat mengisi survei adalah:

1. Para Pihak yang pernah berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
2. Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi yang pernah menerima layanan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
3. Dosen dari berbagai Perguruan Tinggi yang pernah menerima layanan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

B. METODE PENCACAHAN

Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu responden mengisi sendiri kuesioner yang telah disiapkan dalam bentuk tautan yang telah disematkan pada website Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan tujuan untuk menggali informasi terkait layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang telah diterima oleh para responden. Melalui tautan tersebut, responden dapat mengakses secara langsung dan mengisi kuesioner yang telah disiapkan.

C. METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

1. Pengolahan Data

Metode data survei adalah dengan metode kuantitatif karena data berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik untuk melakukan pengukuran yang akurat terhadap sesuatu.

Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan pengumpulan data dengan rentang waktu bulan Januari s.d. Maret 2025. Subyek survei adalah orang yang pernah menerima layanan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Adapun untuk proses pengolahan dan analisis data, alur kerjanya, yang dimulai dari pengumpulan hingga interpretasi data dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini:

a) Pengumpulan Data

Sebelum melakukan pengolahan data, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Sedangkan setelah analisis data yaitu suatu proses penyederhanaan data, maka dapat dilakukan interpretasi data dengan mudah.

b) Koding Data

Proses pengkodean data dilakukan setelah hasil survei terkumpul.

c) Pengolahan Data

Paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan ketika melakukan pengolahan data: (1) Entry data, atau memasukan data dalam proses tabulasi. (2) Melakukan editing ulang terhadap data yang telah ditabulasi untuk mencegah terjadinya kekeliruan memasukan data, atau kesalahan penempatan dalam kolom maupun baris tabel.

2. Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Skala likert merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian (fenomena sosial spesifik), seperti sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang.

Variabel penelitian yang diukur dengan skala likert ini, dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan titik tolak penyusunan item-item instrumen, bisa berbentuk pertanyaan atau pernyataan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kuesioner untuk setiap variabel dalam penelitian ini merupakan jenis kuesioner tertutup, dengan metode pengukuran skala semantik diferensial rasio 1 sampai 6.
- b) Untuk mengukur indikator kinerja/kepuasan skala rasio yang digunakan adalah nilai 1 (Sangat Tidak Puas) sampai dengan nilai 6 (Sangat Puas).

Analisis data untuk menentukan Indeks Persepsi Anti Korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 6. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 6 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data survei Indeks Persepsi Anti Korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi atas pelayanan yang diberikan di setiap tri wulannya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) *Pertama*, menentukan jumlah total skor/jumlah bintang dari masing-masing indikator yang digunakan dalam survei ini.
- b) *Kedua*, mencari jumlah skor/jumlah bintang tertinggi setiap indikator.
- c) *Ketiga*, membagi jumlah total skor/jumlah bintang dari masing-masing indikator dibagi jumlah skor/jumlah bintang tertinggi setiap indikator dikali 4 (empat).

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 6 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 - 100. Skala Indeks Persepsi Korupsi antara 1 - 6 yang artinya mendekati nilai 4 maka Indeks Persepsi Anti Korupsi Sangat Bersih.

3. Metode Pengolahan Data Survei

Kuesioner yang telah diisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Microsoft excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Keputusan MENPAN Nomor 14 Tahun 2017, sehingga sudah sesuai dengan standar nasional. Survei Persepsi Anti Korupsi dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/lembaga pelayanan yang bersangkutan, selanjutnya data diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang didapat sehingga hasil survei dapat lebih bermanfaat.

a) Metode Pengolahan Data

Untuk memperoleh nilai SPAK unit pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai SPAK} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi semua unsur} \times 4}{\text{Total nilai semua unsur maksimum}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara skala 1-100%, maka hasil penilaian tersebut di atas dibagi 4 dan dikalikan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ SPAK} = \frac{\text{Nilai SPAK} \times 100\%}{4}$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- 1) Menambah unsur yang dianggap relevan.
- 2) Memberikan bobot yang berbeda terhadap 5 (lima) unsur yang dominan dalam unit pelayanan.

Table 1 Persepsi, Interval SPAK, Interval Konversi SPAK, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SPAK	NILAI INTERVAL KONVERSI SPAK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Kurang Memuaskan
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Cukup Memuaskan
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Memuaskan
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Memuaskan

b) Perangkat Pengolah Data

- 1) Pengolah Data Dengan Komputer

Data *entry* dan penghitungan survei dapat dilakukan dengan program computer/system data base (Microsoft excel).

2) Mengolah Data Secara Manual

2.1) Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari pertanyaan 1 sampai dengan 5.

2.2) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai survei unit pelayanan adalah sebagai berikut:

2.2.1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing pertanyaan terkait pelayanan dijumlahkan (kebawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata per pertanyaan, masing-masing pertanyaan unsur pelayanan dilakukan penghitungan:

Nilai akhir hasil SPAK dikonversikan ke dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan skala 4 menggunakan rumus berikut:

$$\text{Nilai SPAK} = (\text{jumlah bintang per unsur} / \text{Skor Maksimum per unsur}) \times 4$$

Untuk nilai persentasenya menggunakan rumus berikut:

$$\text{Persentase SPAK} = (\text{Nilai SPAK per unsur} / 4) \times 100\%$$

2.2.2) Nilai survei Anti Korupsi

Nilai akhir hasil SPAK dikonversikan ke dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan skala 4 menggunakan rumus berikut:

$$\text{Nilai SPAK} = (\text{jumlah bintang semua unsur} / \text{Skor Maksimum Semua unsur}) \times 4$$

Untuk nilai persentasenya menggunakan rumus berikut:

$$\text{Persentase SPAK} = (\text{Nilai SPAK} / 4) \times 100\%$$

c) Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan pendidikan terakhir. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis objektivitas.

Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert ini akan dibuat dalam bentuk jumlah bintang, nilai bintang antara 1-6 pada setiap pernyataan, dimana semakin banyak bintang menunjukkan bahwa semakin setuju kualitas pelayanan pada unit layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta semakin baik.

Table 2 Nilai Tingkat Kepuasan

Tingkat Kepuasan / Kenyataan Kinerja	Nilai / Skor Analisis kuantitatif
Sangat Setuju	6
Setuju	5
Cukup Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Untuk membuat skala likert dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan sejumlah pernyataan yang sesuai dengan sikap yang akan diukur dan dapat diidentifikasi dengan jelas (positif atau negatif)
- 2) Memberikan pernyataan-pernyataan tersebut kepada kelompok responden untuk diisi dengan lengkap, jelas dan benar.
- 3) Respon dari setiap pertanyaan dihitung dengan cara menjumlahkan bintang dari setiap pertanyaan serupa, sehingga respon yang berada pada posisi yang sama akan menerima secara konsisten nilai angka yang selalu sama. Misalnya, bernilai 6 untuk sangat positif dan bernilai 1 untuk sangat negatif.
- 4) Hasil hitung akan mendapatkan skor tiap-tiap pernyataan dan skor total, baik untuk setiap responden maupun secara total untuk seluruh responden

Dimana penilaian skala tersebut sebagai hasil persentase akhir penelitian nanti akan dikategorisasikan menurut nilai interval dan level hasil penilaian.

d) Tahap Pembuatan Laporan Survei

Penyusunan Laporan Kegiatan pengukuran Survei dalam rangka penyusunan Indeks Persepsi Anti Korupsi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Periode Triwulan I Tahun 2025 didokumentasikan dalam bentuk laporan, sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Pelaksanaan e-Survei dilakukan dari bulan Januari s.d. Maret 2025, dengan memberikan informasi e-Survei kepada pengguna layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan mekanisme menyampaikan link SURVEI PELAYANAN PUBLIK secara langsung, maupun penyebaran link Survei melalui Whats App, SMS ataupun email calon responden.

Responden dapat mengisi e-Survei persepsi anti korupsi terhadap pelayanan baik melalui komputer/laptop/smartphone. Sebelum menjawab e-Survei, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari alamat email, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.

Untuk mengetahui tingkat Indek Persepsi Anti Korupsi (SPAK), maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam e-Survei. Adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini
2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini
4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini
5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

1. Tahapan Pelaksanaan Survei

Survei indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dilakukan melalui metode penelitian kuantitatif dengan menyebarluaskan elektronik kuesioner (e-Survei) sebagai alat pengumpul data kepada pengguna jasa layanan (responden). Adapun tahapan Survei adalah sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan

- 1) Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk Survei SPAK tahun 2025 sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Nomor 04

Tahun 2023 tentang Pengusulan Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023.

2) Menentukan jumlah responden yang akan di Survei.

b) Tahap Pelaksanaan Survei

1) Tahap Proses Pengumpulan Data.

Pelaksanaan e-Survei dilakukan dari bulan Januari s.d. Maret 2025, dengan melakukan penyebaran e-Survei kepada pengguna layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan mekanisme menyampaikan link SURVEI PELAYANAN PUBLIK secara langsung, maupun penyebaran link Survei melalui Whats App, SMS ataupun email calon responden.

2) Tahap Proses Validasai Data

Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem e-Survei untuk mengetahui perkembangan e-Survei dari bulan Januari s.d. Maret 2025. Survei dari data valid Responden sejumlah 40 Responden dan untuk selanjutnya data yang sudah terkumpul dilakukan proses validasi data dengan hasil sebagai berikut:

2.1) Uji Validitas

Uji validitas atau kesahihan adalah menunjukan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur, berikut hasil perhitungan uji validitas hasil survei terhadap Pengguna layanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Table 3 Uji Validitas dan Reabilitas Hasil Survei

UJI VALIDITAS DAN REABILITAS HASIL SURVEI						
Variabel X						
Responden	P1	P2	P3	P4	P5	Total
1	6	6	6	6	6	30
2	6	6	6	6	6	30
3	6	6	6	6	6	30
4	6	6	6	6	6	30
5	6	6	6	6	6	30
6	6	6	6	6	6	30
7	6	6	6	6	6	30
8	6	6	6	6	6	30
9	6	6	6	6	6	30
10	6	5	5	5	6	27
11	6	5	6	6	5	28

12	5	5	5	6	6	27
13	6	6	6	6	6	30
14	6	6	6	6	6	30
15	6	6	6	6	6	30
16	6	6	6	6	6	30
17	6	6	6	6	6	30
18	6	6	6	6	6	30
19	6	6	6	6	6	30
20	6	6	6	6	6	30
21	6	6	6	6	6	30
22	5	5	5	5	5	25
23	6	6	6	6	6	30
24	5	6	6	6	6	29
25	6	6	6	6	6	30
26	6	6	6	6	6	30
27	6	6	6	6	6	30
28	6	6	6	6	6	30
29	6	6	6	6	5	29
30	6	6	6	6	6	30
31	6	6	6	6	6	30
32	6	6	6	6	6	30
33	6	6	6	6	6	30
34	6	6	6	6	6	30
35	6	6	6	6	6	30
36	6	6	6	6	6	30
37	6	6	6	6	6	30
38	6	6	6	6	5	29
39	6	6	6	6	6	30
40	6	6	6	6	6	30
R Hitung	0,709	0,910	0,891	0,791	0,591	1.184
R Tabel	0,304	0,304	0,304	0,304	0,304	
Keterangan Validitas	valid	valid	valid	valid	valid	
Varian Data	0,071	0,092	0,071	0,049	0,092	0,376
						1.118
Nilai Cronbac"s alpha						0.83
Nilai Acuan						0.70
Kesimpulan :						REALIABLE
(Jika Nilai Cronbac"s alpha > 0,70 maka REALIABLE, Jika Nilai Cronbac"s alpha < 0,70 maka tidak REALIABLE)						

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *r hitung* untuk pernyataan Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini sebesar 0,709; pernyataan

Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini sebesar 0,910; pernyataan Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini sebesar 0,891; Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini sebesar 0,791; Tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini sebesar 0,591;

Nilai *r tabel* sebesar 0,304; nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai *r hitung* untuk seluruh indeks pelayanan publik memiliki nilai *r hitung* yang lebih besar daripada *r tabel*, oleh sebab itu dapat diketahui bahwa seluruh indeks tersebut VALID.

Table 4 Distribusi Nilai r Tabel Signifikansi 5% dan 1%

Tabel r Product Moment
Pada Sig.0,05 (Two Tail)

N	r	N	r	N	r	N	r	N	r	N	r
1	0.997	41	0.301	81	0.216	121	0.177	161	0.154	201	0.138
2	0.95	42	0.297	82	0.215	122	0.176	162	0.153	202	0.137
3	0.878	43	0.294	83	0.213	123	0.176	163	0.153	203	0.137
4	0.811	44	0.291	84	0.212	124	0.175	164	0.152	204	0.137
5	0.754	45	0.288	85	0.211	125	0.174	165	0.152	205	0.136
6	0.707	46	0.285	86	0.21	126	0.174	166	0.151	206	0.136
7	0.666	47	0.282	87	0.208	127	0.173	167	0.151	207	0.136
8	0.632	48	0.279	88	0.207	128	0.172	168	0.151	208	0.135
9	0.602	49	0.276	89	0.206	129	0.172	169	0.15	209	0.135
10	0.576	50	0.273	90	0.205	130	0.171	170	0.15	210	0.135
11	0.553	51	0.271	91	0.204	131	0.17	171	0.149	211	0.134
12	0.532	52	0.268	92	0.203	132	0.17	172	0.149	212	0.134
13	0.514	53	0.266	93	0.202	133	0.169	173	0.148	213	0.134
14	0.497	54	0.263	94	0.201	134	0.168	174	0.148	214	0.134
15	0.482	55	0.261	95	0.2	135	0.168	175	0.148	215	0.133
16	0.468	56	0.259	96	0.199	136	0.167	176	0.147	216	0.133
17	0.456	57	0.256	97	0.198	137	0.167	177	0.147	217	0.133
18	0.444	58	0.254	98	0.197	138	0.166	178	0.146	218	0.132
19	0.433	59	0.252	99	0.196	139	0.165	179	0.146	219	0.132
20	0.423	60	0.25	100	0.195	140	0.165	180	0.146	220	0.132
21	0.413	61	0.248	101	0.194	141	0.164	181	0.145	221	0.131
22	0.404	62	0.246	102	0.193	142	0.164	182	0.145	222	0.131
23	0.396	63	0.244	103	0.192	143	0.163	183	0.144	223	0.131
24	0.388	64	0.242	104	0.191	144	0.163	184	0.144	224	0.131
25	0.381	65	0.24	105	0.19	145	0.162	185	0.144	225	0.13
26	0.374	66	0.239	106	0.189	146	0.161	186	0.143	226	0.13
27	0.367	67	0.237	107	0.188	147	0.161	187	0.143	227	0.13
28	0.361	68	0.235	108	0.187	148	0.16	188	0.142	228	0.129
29	0.355	69	0.234	109	0.187	149	0.16	189	0.142	229	0.129
30	0.349	70	0.232	110	0.186	150	0.159	190	0.142	230	0.129
31	0.344	71	0.23	111	0.185	151	0.159	191	0.141	231	0.129
32	0.339	72	0.229	112	0.184	152	0.158	192	0.141	232	0.128
33	0.334	73	0.227	113	0.183	153	0.158	193	0.141	233	0.128
34	0.329	74	0.226	114	0.182	154	0.157	194	0.14	234	0.128
35	0.325	75	0.224	115	0.182	155	0.157	195	0.14	235	0.127
36	0.32	76	0.223	116	0.181	156	0.156	196	0.139	236	0.127
37	0.316	77	0.221	117	0.18	157	0.156	197	0.139	237	0.127
38	0.312	78	0.22	118	0.179	158	0.155	198	0.139	238	0.127
39	0.308	79	0.219	119	0.179	159	0.155	199	0.138	239	0.126
40	0.304	80	0.217	120	0.178	160	0.154	200	0.138	240	0.126

Catatan :

r **0,05** atau derajat kebebasan sebesar 5 % atau tingkat keyakinan 95%.

2.2) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Pada table 5 Uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,83 atau 83% dimana lebih besar dari nilai minimal Cronbach alpha 0.70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument yang digunakan untuk mengukur indeks pelayanan publik bersifat reliabel.

Table 5 Uji Reliabilitas Cronbach's Alpha

Nilai Acuan	Nilai Cronbac"s alpha	Kesimpulan
0,70	0,83	REALIABLE

2. Survei Persepsi Anti Korupsi

Setelah dilakukan uji validasi dan reliabilitas terhadap data indeks kepuasan masyarakat, maka selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat. Kuesioner yang telah diisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Microsoft excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023 dan Keputusan MENPAN Nomor 14 Tahun 2017, sehingga sudah sesuai dengan standar nasional.

Survei Persepsi Anti Korupsi dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/lembaga pelayanan yang bersangkutan, selanjutnya data diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang didapat sehingga hasil survei dapat lebih bermanfaat. Berikut Tabel hasil pengolahan data survei dengan sistem penghitungan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Untuk mendapatkan nilai rata-rata per pertanyaan, masing-masing pertanyaan unsur pelayanan dilakukan penghitungan:

Nilai akhir hasil SPAK dikonversikan ke dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan skala 4 menggunakan rumus berikut:

$$\text{Nilai SPAK} = (\text{jumlah bintang per unsur} / \text{Skor Maksimum per unsur}) \times 4$$

Untuk nilai persentasenya menggunakan rumus berikut:

$$\text{Persentase SPAK} = (\text{Nilai SPAK per unsur} / 4) \times 100\%$$

Untuk selanjutnya, Instrumen yang disebarakan kepada 40 responden telah terisi dengan baik, sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Indeks persepsi anti korupsi masyarakat memiliki skala antara 1 yang artinya sangat tidak puas sampai dengan 6 yang artinya sangat puas. Indeks tersebut mengukur persepsi anti korupsi masyarakat terhadap pelayanan pada sektor publik yang dalam hal ini adalah pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Berikut ini nilai rata-rata per indikator indeks persepsi anti korupsi masyarakat terhadap layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Table 6 Pengolah Hasil Data Survei

Pengolah Hasil Data Survei SPAK						
Variabel X						
Responden		U 1	U 2	U 3	U 4	U 5
RES	1	6	6	6	6	6
RES	2	6	6	6	6	6
RES	3	6	6	6	6	6
RES	4	6	6	6	6	6
RES	5	6	6	6	6	6
RES	6	6	6	6	6	6
RES	7	6	6	6	6	6
RES	8	6	6	6	6	6
RES	9	6	6	6	6	6
RES	10	6	5	5	5	6
RES	11	6	5	6	6	5
RES	12	5	5	5	6	6
RES	13	6	6	6	6	6
RES	14	6	6	6	6	6
RES	15	6	6	6	6	6
RES	16	6	6	6	6	6
RES	17	6	6	6	6	6
RES	18	6	6	6	6	6

RES	19	6	6	6	6	6
RES	20	6	6	6	6	6
RES	21	6	6	6	6	6
RES	22	5	5	5	5	5
RES	23	6	6	6	6	6
RES	24	5	6	6	6	6
RES	25	6	6	6	6	6
RES	26	6	6	6	6	6
RES	27	6	6	6	6	6
RES	28	6	6	6	6	6
RES	29	6	6	6	6	5
RES	30	6	6	6	6	6
RES	31	6	6	6	6	6
RES	32	6	6	6	6	6
RES	33	6	6	6	6	6
RES	34	6	6	6	6	6
RES	35	6	6	6	6	6
RES	36	6	6	6	6	6
RES	37	6	6	6	6	6
RES	38	6	6	6	6	5
RES	39	6	6	6	6	6
RES	40	6	6	6	6	6
Jumlah		237	236	237	238	236
Skor Maxs		240	240	240	240	240
Nilai SPAK Per Unsur		3,95	3,93	3,95	3,97	3,93
Skala 100		98,75	98,33	98,75	99,17	98,33
NILAI INTERVAL KONVERSI SPAK						98.7
NILAI INTERVAL SPAK						3.9

Berikut persepsi responden mengenai indikator pelayanan publik terkait dengan persepsi anti korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang diukur pada bulan Januari s.d. Maret 2025.

- a. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya).

Table 7 Persepsi Responden

Tingkat Kepuasan	Skor / Jumlah Bintang	Jumlah Responden	Prosentase
Sangat Setuju	6	37	92,50%
Setuju	5	3	7,50%
Cukup Setuju	4	0	0%
Kurang Setuju	3	0	0
Tidak Setuju	2	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0

Tabel tersebut menunjukkan hampir sebagian besar (92,50%) Pemakai layanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan bahwa tidak ada diskriminasi pelayanan menyatakan sangat setuju, dan terdapat 7,50% responden yang berpendapat bahwa tidak ada diskriminasi pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memberikan jawaban setuju.

Berdasarkan tabel Pengolah Hasil Data Survei, hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa pelayanan yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta terkait dengan tidak ada diskriminasi pelayanan sebagian besar menyatakan sangat setuju, hal ini ditunjukkan dengan hasil survei persepsi anti korupsi untuk unsur tersebut sebesar 3,95 atau sebesar 98,75% atau dengan kata lain sangat bersih.

- b. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

Table 8 Persepsi Responden

Tingkat Kepuasan	Skor / Jumlah Bintang	Jumlah Responden	Prosentase
Sangat Setuju	6	36	90,00%
Setuju	5	4	10,00%
Cukup Setuju	4	0	0%
Kurang Setuju	3	0	0%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%

Tabel tersebut menunjukkan hampir sebagian besar (90,00%) Pemakai layanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan bahwa tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan menyatakan sangat setuju, dan terdapat 10,00% responden yang berpendapat bahwa tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan yang memberikan pendapat setuju. Berdasarkan tabel Pengolah Hasil Data Survei, hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa pelayanan yang dilakukan telah diterapkan di Pengadilan Tata Usaha negara Yogyakarta terkait dengan tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan sebagian besar menyatakan sangat setuju, hal ini ditunjukkan dengan hasil survei persepsi anti korupsi untuk unsur tersebut sebesar 3,93 atau 98,33% atau dengan kata lain sangat bersih.

- c. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.

Table 9 Persepsi Responden

Tingkat Kepuasan	Skor / Jumlah Bintang	Jumlah Responden	Prosentase
Sangat Setuju	6	37	92,50%
Setuju	5	3	7,50%
Cukup Setuju	4	0	0%
Kurang Setuju	3	0	0%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%

Tabel tersebut menunjukkan hampir sebagian besar (92,50%) Pemakai layanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan bahwa tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku menyatakan sangat setuju, dan terdapat 7,50% responden yang

berpendapat bahwa tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pengguna layanan memberikan respon setuju.

Berdasarkan tabel Pengolah Hasil Data Survei, hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa pelayanan yang dilakukan telah diterapkan di Pengadilan Tata Usaha negara Yogyakarta terkait respon Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku sebagian besar menyatakan sangat setuju, hal ini ditunjukkan dengan hasil survei persepsi anti korupsi untuk unsur tersebut sebesar 3,95 atau 98,75% atau dengan kata lain sangat bersih.

- d. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).

Table 10 Persepsi Responden

Tingkat Kepuasan	Skor / Jumlah Bintang	Jumlah Responden	Prosentase
Sangat Setuju	6	38	95,00%
Setuju	5	2	5,00%
Cukup Setuju	4	0	0%
Kurang Setuju	3	0	0%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%

Tabel tersebut menunjukkan sebagian besar (95,00%) Pemakai layanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) yang menyatakan sangat setuju, dan terdapat 5,00% responden yang berpendapat bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) pengguna layanan yang memberikan respon setuju.

Berdasarkan tabel Pengolah Hasil Data Survei, hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa pelayanan yang telah diterapkan di Pengadilan Tata Usaha negara Yogyakarta terkait Tidak ada pungutan liar (pungli) sebagian besar menyatakan sangat setuju, hal ini ditunjukkan dengan hasil survei

persepsi anti korupsi untuk unsur tersebut sebesar 3,97 atau 99,17% atau dengan kata lain sangat bersih.

- e. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

Table 11 Persepsi Responden

Tingkat Kepuasan	Skor / Jumlah Bintang	Jumlah Responden	Prosentase
Sangat Setuju	6	36	90,00%
Setuju	5	4	10,00%
Cukup Setuju	4	0	0%
Kurang Setuju	3	0	0%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%

Tabel tersebut menunjukkan hampir sebagian besar (90,00%) Pemakai layanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan bahwa Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi yang menyatakan sangat setuju, namun terdapat 10,00% responden yang berpendapat bahwa tidak ada percaloan/perantara tidak resmi dalam pelayanan pengguna layanan memberikan respon setuju.

Berdasarkan tabel Pengolah Hasil Data Survei, hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa pelayanan yang telah diterapkan di Pengadilan Tata Usaha negara Yogyakarta terkait Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi sebagian besar menyatakan sangat setuju, hal ini ditunjukkan dengan hasil survei persepsi anti korupsi untuk unsur tersebut sebesar 3,93 atau 98,33% atau dengan kata lain sangat bersih.

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Persepsi Anti Korupsi tersebut diatas, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Berikut hasil rekapitulasi nilai unsur layanan dan nilai unsur unit pelayanan yang diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan sebagaimana tabel berikut:

Table 12 Nilai Persepsi Setiap Unsur Pelayanan

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PERSEPSI	PREDIKAT
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan	3,95	Sangat Bersih
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur	3,93	Sangat Bersih
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas	3,95	Sangat Bersih
4	Tidak ada pungutan liar	3,97	Sangat Bersih
5	Tidak ada percaloan	3,93	Sangat Bersih
Nilai Persepsi Seluruh Unsur Pelayanan		3,90	Sangat Bersih
Nilai Persepsi Seluruh Unsur Skala 100		98,7	

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Dari Hasil survei persepsi anti korupsi pada layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta periode Januari s.d. Maret 2025, diketahui bahwa unsur pelayanan tidak ada pungutan liar merupakan unsur yang mendapatkan penilaian tertinggi yaitu dengan penilaian 3,97. Secara umum seluruh unsur layanan mendapat nilai SANGAT BERSIH pada rentang nilai 3,93–3,97. Meskipun dilihat dari keseluruhan penilaian persepsi tidak ada penilaian kurang, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tetap memperhatikan pelayanan pada nilai yang terendah dari hasil survei ini yaitu pada kategori tidak ada pelayanan diluar prosedur dan tidak ada percaloan dengan nilai indek 3,93, dan tetap perlu untuk lebih ditingkatkan, dengan cara terus menghimbau kepada seluruh Pegawai agar melayani masyarakat tanpa diskriminasi dan melaksanakan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pengguna layanan, serta meningkatkan pengawasan, dan rencana perbaikan ini dapat dilaksanakan atau ditindaklanjuti pada triwulan berikutnya.

BAB IV DATA SURVEI

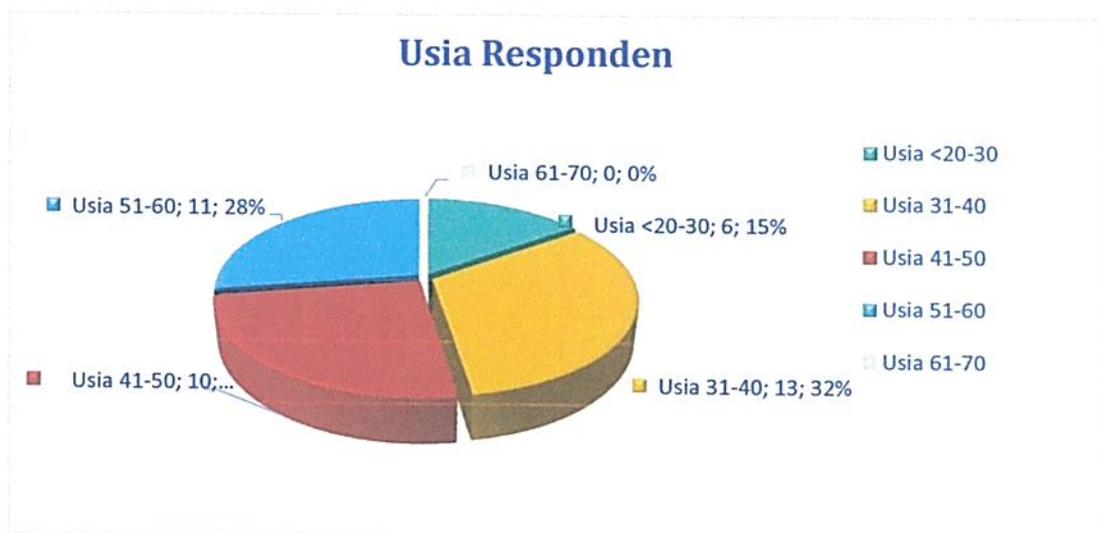
A. Data Responden

Survei persepsi anti korupsi yang dilakukan adalah survei langsung kepada 40 responden yang merupakan para penerima layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dari bulan Januari s.d. Maret 2025 yang berpartisipasi mengisi kuesioner secara langsung dengan lengkap. Sebelum melakukan analisis terhadap hasil survei, akan disajikan gambaran data deskripsi responden. Deskripsi responden tersebut berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan responden. Jumlah responden yang turut ambil bagian dalam Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap Tata Kelola Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, tersebut berdasar latar belakang jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan responden dapat dibagi sebagaimana dalam gambar tersebut di bawah ini. Berikut ini adalah hasil pie chart berdasarkan 40 responden:

1. Kelompok Usia Responden

Responden pengguna layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 31 tahun s/d 40 tahun.

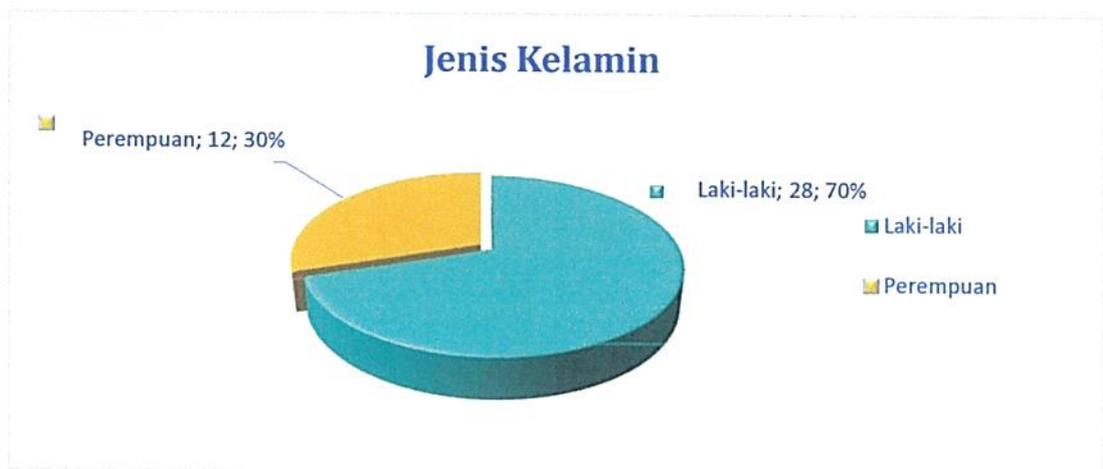
Gambar 1 Usia Responden



2. Kelompok Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa pengguna layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebanyak 28, 72,00% adalah laki-laki dan 12, 28,00% adalah perempuan.

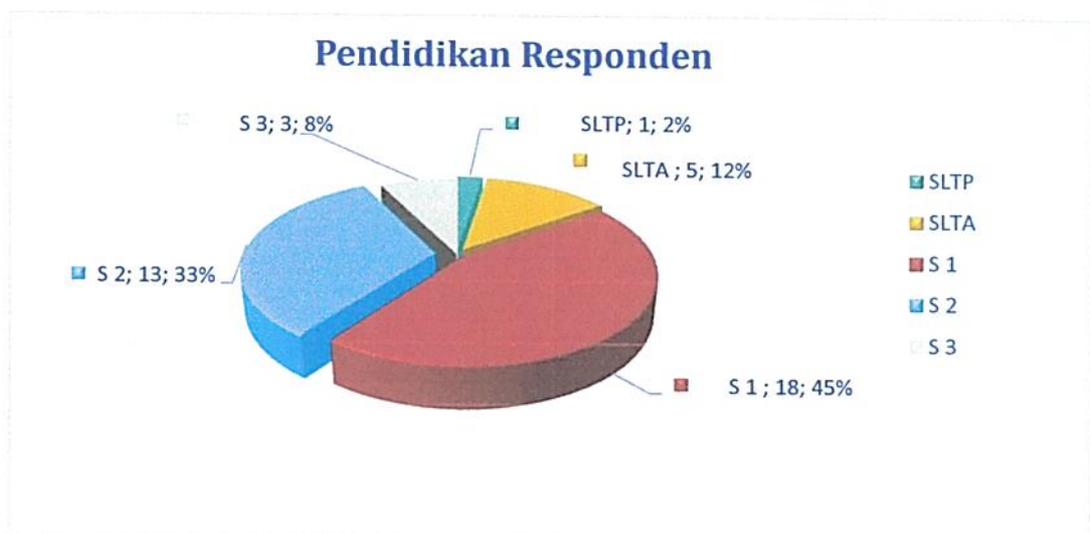
Gambar 2 Jenis Kelamin Responden



3. Tingkat Pendidikan Responden

DDari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa pengguna layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang berlatar belakang pendidikan terbanyak adalah SMP sebesar 1, 2,00%, selanjutnya SLTA sebesar 5, 12,00%, selanjutnya S1 sebanyak 18, 45,00%, S2 sebanyak 13, 33,00% dan S3 sebanyak 3, 8,00%.

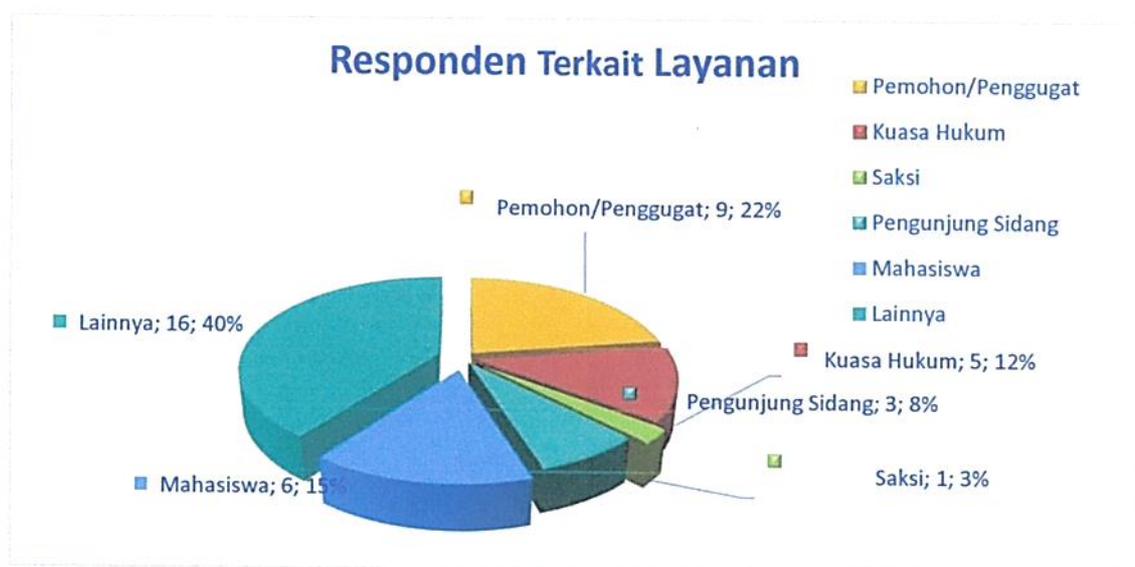
Gambar 3 Tingkat Pendidikan Responden



4. Kelompok Responden Terkait Layanan

Responden berdasarkan keterkaitan layanan terdiri dari Mahasiswa sebanyak 6, 15,00%, Dosen dan lainnya sebanyak 16, 40,00%, Pemohon/Penggugat sebanyak 9, 22,00% Pengunjung Sidang 3, 8,00% Saksi 1, 3,00% dan Kuasa Hukum sebanyak 5, 12,00%.

Gambar 4 Responden Terkait Layanan



B. Data Dukung Lainnya

Data dukung dalam pelaksanaan survei persepsi kualitas pelayanan publik adalah Data Responden Valid.

LAMPIRAN

DATA RESPONDEN SPAK TRIWULAN I TAHUN 2025

Periode : Januari-Maret 2025

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Layanan yang diterima	1	2	3	4	5
1	Dian Sapto Nugroho	32	Laki - laki	S-1	Pemohon/Termohon/ Penggugat/Tergugat	Gugatan	6	6	6	6	6
2	Norman Prastowo	47	Laki - laki	S-1	Pemohon/Termohon/ Penggugat/Tergugat	Gugatan	6	6	6	6	6
3	Agoes Siffie R.W.	35	Perempuan	S-1	Pemohon/Termohon/ Penggugat/Tergugat	Gugatan	6	6	6	6	6
4	M. Rizky Fadillah	20	Laki - laki	S-1	Mahasiswa	Lainnya: Praktik Sidang	6	6	6	6	6
5	Novia Eliza	21	Perempuan	SLTA	Mahasiswa	Lainnya: Magang	6	6	6	6	6
6	Helina Nur'aini	59	Perempuan	S-1	Lainnya: Jaksa Pengacara Negara	Pengunjung Sidang	6	6	6	6	6
7	Hendra Apriansyah	52	Laki - laki	S-2	Pengunjung Sidang	Pengunjung Sidang	6	6	6	6	6
8	Dani Habibi	31	Laki - laki	S-2	Lainnya: Akademik	Akademis	6	6	6	6	6
9	Yulianto Pamungkas	31	Laki - laki	S-1	Kuasa Hukum Penggugat	Gugatan	6	6	6	6	6
10	Budi Wandhani	37	Laki - laki	S-2	Pemohon/Termohon/ Penggugat/Tergugat	Gugatan	6	5	5	5	6
11	Parningotan Tua Marbun	33	Laki - laki	S-2	Pemohon/Termohon/ Penggugat/Tergugat	Gugatan	6	5	6	6	5
12	Awang Guntoro, S.H.,M.H.	50	Laki - laki	S-1	Pemohon/Termohon/ Penggugat/Tergugat	Gugatan	5	5	5	6	6
13	Semi Hastuti	52	Perempuan	S-2	Lainnya: Pendamping Magang	Akademis	6	6	6	6	6
14	Sudi Harjendro, S.H.	54	Laki - laki	S-1	Lainnya: Pendamping Mahasiswa	Lainnya: Pembekalan Materi Acara PTUN	6	6	6	6	6
15	Yusnita Ritonga, S.H.,M.H.	59	Perempuan	S-2	Lainnya: JPN Kejati DIY	Lainnya: Praktik Hukum	6	6	6	6	6
16	Edi Pujiyono	49	Laki - laki	S-1	Lainnya: Monitoring PPL	Akademis	6	6	6	6	6
17	Hariyanto	49	Laki - laki	S-3	Mahasiswa	Akademis	6	6	6	6	6
18	Achmad Djunaidi	55	Laki - laki	S-2	Lainnya: Monitoring PPL	Lainnya: Monitoring PPL	6	6	6	6	6
19	Ikhsanudin	43	Laki - laki	SLTA	Lainnya: Tim Monitoring PPL	Lainnya: Tim PPL UIN	6	6	6	6	6
20	Leonordus Farel	21	Laki - laki	S-1	Mahasiswa	Akademis	6	6	6	6	6
21	Hasana Budi P. S.H.,M.H.	34	Laki - laki	S-2	Lainnya	Akademis	6	6	6	6	6

22	Muhammad Faqih	28	Laki - laki	S-2	Lainnya: PKL	Akademis	5	5	5	5	5
23	Derta Nur Anita	31	Perempuan	S-2	Lainnya: PKL	Lainnya: PKL	6	6	6	6	6
24	Mohammad Sholahuddin, S.H.,M.H.	47	Laki - laki	S-2	Lainnya: Dosen Pembimbing PKL	Lainnya: Kuliah Umum Mahasiswa	5	6	6	6	6
25	Ilimi Firdaus A.	27	Perempuan	S-2	Pengunjung Sidang	Pengunjung Sidang	6	6	6	6	6
26	Dr. Sarbini, S.H.,M.H.	51	Laki - laki	S-3	Mahasiswa	Akademis	6	6	6	6	6
27	Sirojul Bahrudin	26	Laki - laki	S-1	Mahasiswa	Akademis	6	6	6	6	6
28	Dr. Lily Solichus M.S.H.,M.H.	55	Perempuan	S-3	Mahasiswa	Akademis	6	6	6	6	6
29	Eli Suparno	43	Laki - laki	SLTA	Pemohon/Termohon/ Penggugat/Tergugat	Gugatan	6	6	6	6	5
30	Nayla Melkia	38	Perempuan	S-1	Kuasa Hukum/Penasehat Hukum	Gugatan	6	6	6	6	6
31	Heru Lestarianto	52	Laki - laki	S-1	Kuasa Hukum/Penasehat Hukum	Gugatan	6	6	6	6	6
32	Eko Ari Permadi	42	Laki - laki	S-1	Kuasa Hukum/Penasehat Hukum	Gugatan	6	6	6	6	6
33	Heri Andriyanto	35	Laki - laki	S-1	Kuasa Hukum/Penasehat Hukum	Gugatan	6	6	6	6	6
34	Widarti	59	Perempuan	SMP	Pemohon/Termohon/ Penggugat/Tergugat	Permohonan	6	6	6	6	6
35	Junius B. Bunga'a	42	Laki - laki	S-1	Pengunjung Sidang	Pengunjung Sidang	6	6	6	6	6
36	Tri Rahmawati	37	Perempuan	S-1	Pemohon/Termohon/ Penggugat/Tergugat	Gugatan	6	6	6	6	6
37	Ngadiyono	54	Laki - laki	SLTA	Lainnya	Lainnya	6	6	6	6	6
38	Topo Wahyudi	39	Laki - laki	SLTA	Saksi	Gugatan	6	6	6	6	5
39	Drs. H. Muslih, S.H.,M.H.	58	Laki - laki	S-2	Lainnya: Akademis	Akademis	6	6	6	6	6
40	Triwahyu Hartanto	41	Laki - laki	S-1	Lainnya: Akademis	Akademis	6	6	6	6	6